

# PENINGKATAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL MELALUI SOSIALISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ajen Sri Iradatullah

NPP. 32.0876

Asdaf Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: [ajensri@gmail.com](mailto:ajensri@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Ferdinandus Jaftoran, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Digital Population Identity (IKD) is a government innovation aimed at supporting digital transformation to enhance the efficiency and accessibility of public services. However, its implementation has not been optimal due to limitations in digital infrastructure, low technological literacy, and service accessibility barriers. Therefore, effective outreach is necessary to encourage public adoption of IKD. **Purpose:** This study aims to know the increase in IKD activation through outreach efforts conducted by the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) in Jeneponto Regency, South Sulawesi Province. **Method:** This study uses a qualitative approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. The theoretical framework used is Everett M. Rogers' Diffusion of Innovations, which consists of five stages: knowledge, persuasion, decision, implementation, and confirmation. **Result:** Intensive intensive outreach conducted by Disdukcapil through direct engagement in villages/urban wards, collaboration with local stakeholders, and the use of social media has successfully increased IKD activation from 1,983 in 2023 to 11,914 in 2024. However, several obstacles remain, such as limited internet connectivity, low digital literacy, and the underutilization of IKD by other user institutions. As a result, IKD implementation has not yet met the national targets set by the government. **Conclusion:** The success in increasing IKD activation is influenced by adaptive outreach approaches and active support from the local government. Collaborative and continuous efforts between the government, the community, and relevant institutions are necessary to accelerate the widespread adoption and utilization of IKD.

**Keywords:** Digital Population Identity, Outreach, Diffusion of Innovation, IKD Activation, Jeneponto.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi pemerintah dalam rangka mendukung transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, serta hambatan akses layanan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang efektif untuk mendorong adopsi IKD di masyarakat. **Tujuan:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivasi IKD melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah *Diffusion of Innovations* dari Everett M. Rogers yang meliputi lima tahapan: pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. **Hasil/Temuan:** Sosialisasi yang dilakukan secara intensif oleh Disdukcapil, melalui terjun langsung ke desa/kelurahan, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, serta pemanfaatan media sosial, mampu meningkatkan aktivasi IKD dari 1.983 pada tahun 2023 menjadi 11.914 pada tahun 2024. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pemanfaatan IKD oleh lembaga pengguna lainnya. Sehingga implementasi IKD belum memenuhi target nasional yang telah diberikan oleh pemerintah. **Kesimpulan:** Keberhasilan peningkatan aktivasi IKD dipengaruhi oleh pendekatan sosialisasi yang adaptif dan dukungan aktif dari pemerintah daerah. Diperlukan upaya kolaboratif dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mempercepat adopsi dan pemanfaatan IKD secara luas.

**Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Sosialisasi, Difusi Inovasi, Aktivasi IKD, Jeneponto.**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Era digital saat ini menuntut adanya transformasi fundamental dalam sistem administrasi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan data kependudukan. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bentuk modernisasi dari KTP-el, yang bertujuan mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi sistem kependudukan. Namun, implementasi IKD di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk di Kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan data dari Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan, tingkat aktivasi IKD di Kabupaten Jeneponto hingga awal tahun 2024 baru mencapai 11.914 dari total 300.446 penduduk wajib KTP, atau hanya sekitar 3,96%. Jumlah ini masih jauh dari target nasional yang menetapkan 30% aktivasi Identitas Kependudukan Digital per kabupaten/kota. Rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya persoalan dalam proses implementasi, khususnya dalam aspek komunikasi dan pemahaman masyarakat.

Secara global, tantangan serupa juga ditemukan. Penelitian Hilowle et al. (2024) menegaskan bahwa keberhasilan sistem identitas digital sangat bergantung pada faktor human-centric seperti literasi digital, rasa aman terhadap data, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Kurangnya strategi onboarding yang inklusif menjadi faktor utama rendahnya adopsi digital ID (Spiliotopoulos et al., 2023). Sementara itu, Schmid dan Alt (2023) menyoroti bahwa faktor sosial, seperti pendidikan, privasi, dan pengalaman digital, sangat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap identitas digital. Temuan ini memperkuat bahwa keberhasilan IKD tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada pendekatan komunikasi yang partisipatif dan edukatif.

Hutasoit (2017) menyatakan bahwa permasalahan kependudukan tidak hanya menyangkut aspek kuantitas, tetapi juga kualitas penduduk, termasuk dalam hal literasi teknologi dan kesadaran hukum. Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat Jeneponto yang sebagian besar bekerja sebagai petani, nelayan, dan pelaku usaha informal dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah, sehingga adaptasi terhadap teknologi digital relatif lambat. Salah satu strategi penting untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat terhadap inovasi pemerintah adalah melalui sosialisasi. Sosialisasi kebijakan publik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman dan kepercayaan. Gatningsih dan Sutrisno (2017) menegaskan bahwa pembangunan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan dan penggunaannya dalam pelayanan publik harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Sosialisasi IKD yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dilakukan melalui terjun langsung ke desa/kelurahan dan pelayanan langsung di kantor Disdukcapil, namun capaian aktivasi masih belum optimal

Dalam perspektif penelitian kebijakan, Simangunsong (2017:230) menekankan bahwa kajian terhadap implementasi program pemerintah perlu mempertimbangkan faktor sosial, geografis, dan budaya lokal agar hasil analisis bersifat aplikatif dan solutif. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada bagaimana sosialisasi sebagai strategi komunikasi publik berperan dalam mendorong peningkatan aktivasi IKD di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menjadi penting sebagai bentuk evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan kebijakan digitalisasi kependudukan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya mengidentifikasi kendala, strategi, dan efektivitas kegiatan sosialisasi dalam mendorong pemanfaatan layanan digital berbasis identitas oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Identitas Kependudukan Digital merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung transformasi digital dan memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan. Namun, capaian aktivasi IKD secara nasional belum merata. Di Kabupaten Jeneponto, tingkat aktivasi IKD per awal tahun 2024 baru mencapai 3,96% dari total penduduk wajib KTP, jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Padahal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jeneponto telah melakukan berbagai upaya sosialisasi secara intensif, baik melalui kunjungan langsung ke desa/kelurahan, pemanfaatan media sosial, hingga kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital, serta menekankan peran strategis sosialisasi dalam meningkatkan tingkat adopsi IKD di masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan di wilayah dengan infrastruktur digital, literasi teknologi, dan partisipasi masyarakat yang relatif lebih tinggi. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menggali dinamika dan efektivitas sosialisasi IKD di wilayah rural dengan keterbatasan geografis, rendahnya literasi digital, serta dominasi masyarakat berpendidikan rendah seperti di Kabupaten Jeneponto.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dalam pemahaman terkait bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan di daerah dengan hambatan struktural mampu (atau belum mampu) mendorong aktivasi IKD secara optimal. Penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam mengenai peningkatan aktivasi IKD melalui sosialisasi, hambatan yang dihadapi, dan strategi yang diterapkan oleh Disdukcapil dalam meningkatkan aktivasi IKD di Kabupaten Jeneponto.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Identitas Kependudukan Digital. Penelitian Restu Widyo Sasongko (2023) yang berjudul *Impelementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung*, penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah cukup siap mengimplementasikan Identitas

Kependudukan Digital (IKD). Namun, disoroti pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat karena tingkat pemahaman teknologi yang bervariasi. Memberikan gambaran komprehensif tentang kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan IKD dengan baik namun perlu diupayakan sosialisasi dan edukasi lebih masif. Penelitian Enis Tristina, Rizda dan Sri Wahyuningsih Yulianti (2023) yang berjudul *Pelaksanaan Inovasi Identitas Kependudukan Digital sebagai Wujud Transformasi Digital Dokumen Kependudukan di Kabupaten Karanganyar*, melalui pengabdian masyarakat dan workshop, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman warga terhadap IKD meningkat secara signifikan. Menyoroti pentingnya pendekatan edukatif dan komunikatif dalam pelaksanaan sosialisasi IKD yang juga menjadi strategi utama dalam penelitian di Kabupaten Jeneponto. Penelitian Muhammad Khumaidi Nursyarif, Muhamad Wahyu Tirta, Tri Wahyudi, Siti Patimah, Siti Muawwanah dan Arbansyah (2024) yang berjudul *Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Samarinda pada Revolusi Digital*, sosialisasi IKD di Samarinda dilaksanakan dengan baik dan mendapat respons antusias masyarakat. Namun, ditemukan perlunya edukasi tambahan tentang keamanan data serta perbaikan fitur aplikasi. Menguatkan pentingnya edukasi berkelanjutan dan penyesuaian teknologi terhadap kebutuhan pengguna, terutama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Penelitian Ayu Sabrina Sugandini dan Rachmawati Novaria (2024) yang berjudul *Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari melalui Pengoptimalisasian Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)*, Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan, kampanye kesadaran, dan konsultasi digital mampu meningkatkan pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap IKD. Menggarisbawahi pentingnya literasi digital sebagai pondasi penerimaan teknologi baru seperti IKD, sejalan dengan tantangan literasi digital di Jeneponto. Penelitian Dian Herdiana (2018) yang berjudul *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar*, penelitian ini membahas sosialisasi sebagai proses penting dalam kebijakan publik, yaitu penyebaran isi kebijakan kepada kelompok sasaran untuk membangun pemahaman sebelum implementasi. Sosialisasi tidak termasuk dalam siklus kebijakan formal, namun memiliki posisi strategis dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Memberikan dasar teoritis untuk memahami pentingnya sosialisasi dalam mendukung keberhasilan program kebijakan publik seperti aktivasi IKD. penelitian Zhao, B., Cheng, S., Schiff, K. J., dan Kim, Y. (2023) yang berjudul *Digital Transparency and Citizen Participation: Evidence from the Online Crowdsourcing Platform of the City of Sacramento*, penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi dan partisipasi warga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik dalam menggunakan platform digital pemerintah. Partisipasi meningkat apabila warga merasa terlibat dan memahami sistem digital yang disediakan. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi IKD yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mengedukasi masyarakat secara aktif, seperti yang dilakukan oleh Disdukcapil Jeneponto. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap sistem IKD, semakin besar kemungkinan mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Penelitian Faruq, M., Wardiyanto, B., Umpain, S. H., dan Toyib, M. (2024) yang berjudul *Collaboration of Stakeholders and AI in the Implementation of New Public Service in the Digital Era*, Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan implementasi layanan digital. Teknologi saja tidak cukup diperlukan dukungan sosial dan organisasi dari tingkat lokal untuk mendukung keberlanjutan program. Sosialisasi IKD di Jeneponto dilakukan tidak hanya oleh Disdukcapil, tetapi juga melibatkan tokoh desa dan lembaga lokal. Pendekatan kolaboratif ini membuktikan bahwa strategi pelibatan sosial sangat penting untuk memperluas adopsi layanan berbasis teknologi seperti IKD.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus analisis terhadap peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui sosialisasi IKD di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks, yaitu Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya dilakukan di daerah dengan infrastruktur digital yang memadai dan literasi teknologi yang relatif tinggi, penelitian ini mengangkat konteks lokal yang khas, di mana rendahnya literasi digital, keterbatasan jaringan internet, dan dominasi mata pencaharian agraris menjadi hambatan utama dalam aktivasi IKD.

Selain itu, penelitian ini mengaplikasikan teori Diffusion of Innovations dari Everett M. Rogers untuk menganalisis proses adopsi IKD mulai dari tahap pengetahuan hingga konfirmasi, dalam konteks sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil penelitian ini tidak hanya memotret capaian kuantitatif aktivasi IKD, tetapi juga menggambarkan dinamika partisipasi masyarakat, strategi komunikasi yang digunakan, serta hambatan dan solusi yang ditemui di lapangan.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan melalui sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, faktor penghambat dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Moleong (2018:7) menerangkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami pengalaman subjek penelitian secara mendalam, termasuk perilaku, perspektif, dan memotivasi mereka. Creswell (2009:22) memperluas definisi penelitian kualitatif sebagai cara untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap masalah sosial. Proses ini melibatkan perumusan pertanyaan penelitian, pengembangan prosedur, pengumpulan dan analisis data, serta interpretasi yang mendalam. Pemilihan pendekatan induktif dalam penelitian ini secara khusus dimaksudkan untuk menggali pemahaman mendalam dari pengalaman empiris di lapangan. Metode kualitatif dengan pendekatan induktif digunakan untuk memahami secara mendalam proses peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jeneponto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga metode utama, yaitu: observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami proses pelaksanaan sosialisasi secara langsung di lapangan, sementara wawancara mendalam dilakukan terhadap 11 informan yang dipilih secara purposive, termasuk pejabat Disdukcapil, pelaksana lapangan, dan masyarakat penerima sosialisasi. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data dari observasi dan wawancara, dengan mengkaji dokumen resmi, data statistik, serta laporan kegiatan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam model analisis data kualitatif dalam Lubis (2018:44). Peneliti menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data, sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif. Sebagai kerangka teoritis, penelitian ini menggunakan teori Diffusion of Innovations yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers (1995). Teori ini menjelaskan lima tahapan adopsi inovasi, yaitu: (1) pengetahuan, (2) persuasi, (3) pengambilan keputusan, (4) implementasi dan (5) konfirmasi. Lima tahapan ini digunakan sebagai lensa analisis

untuk mengevaluasi proses sosialisasi IKD dan tingkat adopsi masyarakat di Jeneponto terhadap inovasi tersebut.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi teori *Diffusion of Innovations* menurut Rogers E.M (1995:11-31) untuk menganalisis peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto. Dalam teori ini terdapat lima dimensi yaitu, Pengetahuan, Persuasi, Keputusan, implemetasi dan konfirmasi

#### **3.1. Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan tahap awal dimana masyarakat pertama kali mengenal dan memahami keberadaan IKD melalui sosialisasi yang dilakukan Disdukcapil Jeneponto, tanpa pengetahuan, masyarakat tidak akan mampu melanjutkan ke tahapan berikutnya. Setelah mengetahui tentang IKD masyarakat mulai menunjukkan sikap positif atau negatif terhadap inovasi tersebut.

Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat melalui berbagai cara strategi dan metode baik dari sosialisasi, event, pemberitahuan di media sosial dan secara langsung melibatkan para pemangku kebijakan. Selain itu menurut tim sosialisasi Identitas Kependudukan Digital untuk memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat mengenai Identitas Kependudukan Digital mereka memberikan materi mengenai manfaat dan kegunaan serta pentingnya Identitas Kependudukan Digital dan cara aktivasinya.

Tim sosialisasi juga menjelaskan kepada masyarakat mengenai manfaat IKD dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menjelaskan bahwa dengan adanya Identitas Kependudukan Digital mereka tidak perlu lagi membawa banyak dokumen fisik ketika akan melakukan pengurusan administrasi, cukup dengan menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang ada di smartphone mereka. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan secara mendalam dan dapat melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

#### **3.2. Persuasi**

Dimensi persuasi menjadi tahapan dimana menjelaskan bahwa sosialisasi yang efektif bertujuan membangun persepsi positif supaya masyarakat terdorong untuk mempertimbangkan aktivasi IKD. Persuasi adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mengubah sikap atau perilaku mereka. Dalam konteks Identitas Kependudukan Digital, persuasi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi layanan ini, sehingga memudahkan akses dan penggunaan dokumen kependudukan secara digital. Apabila dikaitkan dengan konteks Identitas Kependudukan Digital, persuasi dapat digunakan untuk meyakinkan masyarakat tentang manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh inovasi tersebut.

Sikap positif masyarakat terhadap IKD tercermin dari pandangan masyarakat yang mengakui manfaat praktis dan efisiensi yang ditawarkan, seperti kemudahan akses data pribadi tanpa harus membawa dokumen fisik. Pernyataan dari Kepala Dinas Dukcapil Jeneponto serta pengakuan langsung dari salah satu masyarakat seperti pak Zulkarnadi, menunjukkan bahwa IKD dinilai sebagai solusi modern yang relevan di era digital. persepsi kemudahan penggunaan aplikasi IKD juga menjadi faktor penting yang memperkuat sikap positif tersebut.

Meskipun demikian, pada dimensi persuasi belum sepenuhnya berhasil. Tidak semua masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap inovasi ini, terutama mereka yang masih belum paham teknologi.

Persepsi ini bisa muncul akibat kurangnya tingkat literasi, pemahaman atau pengalaman menggunakan aplikasi digital secara umum salah satunya meliputi penduduk rentan (lanjut usia).

### **3.3. Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan merupakan tahapan masyarakat memutuskan untuk melakukan aktivasi IKD atau tidak setelah melewati tahapan pengetahuan dan hasil dari persuasi, semakin kuat pengetahuan dan keyakinan positif semakin besar juga kemungkinan masyarakat mengambil keputusan untuk mengaktifkan IKD. Pengambilan keputusan untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital dilakukan masyarakat setelah mengetahui manfaat yang ada pada Identitas Kependudukan Digital, salah satu masyarakat beranggapan bahwa aplikasi Identitas Kependudukan Digital membantu memudahkan pengguna dalam mengakses data kependudukan melalui HP. Kemudahan dalam menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital juga menjadi salah satu pertimbangan masyarakat untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Manfaat yang diberikan oleh aplikasi Identitas Kependudukan Digital juga menjadi faktor yang mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD.

Bapak Hermanto pada tanggal 22 Januari 2025 beranggapan walaupun di Kabupaten Jeneponto sendiri belum terasa secara langsung manfaat dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital tersebut akan tetapi manfaat dari aplikasi tersebut masih bisa dirasakan di tempat lain, selain itu bapak Hermanto juga percaya bahwa inovasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini merupakan inovasi yang sangat berguna kedepannya di mana perkembangan zaman yang semakin meningkat menuntut masyarakat agar dapat mengimbangi perubahan zaman yang serba digital, tingkat keamanan pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital juga lebih menjamin dibandingkan dengan metode tradisional.

Dapat disimpulkan bahwa, program sosialisasi IKD mendukung dalam pengambilan keputusan masyarakat terlihat dari adanya masyarakat yang mulai melakukan aktivasi setelah memahami manfaat aplikasi, seperti kemudahan akses data kependudukan melalui HP dan tingkat keamanan yang lebih terjamin. Kepercayaan terhadap inovasi ini menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil mempengaruhi sebagian masyarakat untuk mengambil keputusan secara sadar dalam beralih ke layanan digital. Walaupun belum sepenuhnya berhasil, masih ada masyarakat belum merasa perlu mengaktifkan IKD karena manfaatnya belum dirasakan langsung, terutama karena lembaga pelayanan masih mengandalkan dokumen fisik. Ketiadaan aturan wajib serta faktor sosial budaya dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem digital turut menjadi alasan rendahnya pengambilan keputusan aktivasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi dan dukungan kebijakan agar keputusan masyarakat lebih berpihak pada pemanfaatan IKD

### **3.4. Implementasi**

Setelah memutuskan masyarakat melaksanakan keputusan tersebut dengan cara mengunduh aplikasi IKD, mendaftar dan menggunakan fitur yang ada, tahapan ini merupakan perwujudan nyata dari keputusan masyarakat. Implementasi Identitas Kependudukan Digital dapat dikatakan terlaksana dengan baik atau tidak dengan melihat jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi IKD. Kemudahan dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah aktivasi IKD, seperti pada dasarnya tujuan aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat menyatakan bahwa aplikasi Identitas Kependudukan Digital cukup mudah untuk digunakan, aplikasi tersebut dapat digunakan dengan mudah bagi masyarakat yang sudah paham teknologi, adapun beberapa masyarakat menyatakan bahwa bagi masyarakat yang belum paham teknologi akan mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan aplikasi tersebut terutama bagi

masyarakat yang sudah lanjut usia.

Kabupaten Jeneponto sendiri jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital sudah lebih meningkat dibandingkan ketika pertama kali pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Adapun jumlah aktivasi IKD pada tahun 2023 seperti bawah ini :

**Tabel 3.4.1**  
**Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Tahun 2023 di Kabupaten Jeneponto**

NO	WILAYAH	KODE	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	SUDAH PEREKAMAN	JUMLAH AKTIVASI IKD
1	BANGKALA	73.04.01	61.696	44.017	40.131	304
2	TAMALATEA	73.04.02	51.350	36.157	32.015	218
3	BINAMU	73.04.03	64.897	46.031	41.860	457
4	BATANG	73.04.04	21.983	16.482	14.780	108
5	KELARA	73.04.05	30.600	22.724	20.560	156
6	BANGKALA BARAT	73.04.06	32.775	23.107	20.741	121
7	BONTORAMBA	73.04.07	42.009	30.929	27.066	150
8	TURATEA	73.04.08	36.067	26.660	23.713	159
9	ARUNGKEKE	73.04.09	22.579	16.195	14.933	141
10	RUMBIA	73.04.10	26.687	19.547	17.766	76
11	TAROWANG	73.04.11	25.871	18.501	17.169	93
<b>JENEPONTO</b>		<b>73.04</b>	<b>416.514</b>	<b>300.350</b>	<b>270.734</b>	<b>1.983</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto 2025*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2023 sangatlah rendah yakni hanya sekitar 1.983 penduduk. Berdasarkan hal tersebut maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi mengenai Identitas Kependudukan Digital. Langkah ini dilakukan untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai Identitas Kependudukan Digital, manfaat dan tujuan dari Identitas Kependudukan Digital tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui lebih dalam mengenai Identitas Kependudukan Digital dan diharapkan dapat melakukan aktivasi IKD.

Setelah melakukan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital di tiap Kelurahan/Desa di Kabupaten Jeneponto jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital meningkat dibandingkan dengan jumlah aktivasi sebelumnya, dapat dilihat dari data jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Jeneponto di bawah ini :

**Tabel 3.4.2**  
**Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Tahun 2024 di Kabupaten Jeneponto**

NO	WILAYAH	KODE	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	SUDAH PEREKAMAN	JUMLAH AKTIVASI IKD
1	BANGKALA	73.04.01	63,282	44,656	41,837	1,375

NO	WILAYAH	KODE	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	SUDAH PEREKAMAN	JUMLAH AKTIVASI IKD
2	TAMALATEA	73.04.02	51,996	36,019	33,716	1,147
3	BINAMU	73.04.03	64,749	45,163	43,865	3,118
4	BATANG	73.04.04	22,010	16,298	15,334	670
5	KELARA	73.04.05	31,159	22,832	21,496	892
6	BANGKALA BARAT	73.04.06	33,189	23,132	21,568	751
7	BONTORAMBA	73.04.07	42,273	30,641	28,342	895
8	TURATEA	73.04.08	36,305	26,451	24,809	1,249
9	ARUNGKEKE	73.04.09	22,921	16,268	15,937	657
10	RUMBIA	73.04.10	27,583	19,885	18,824	478
11	TAROWANG	73.04.11	26,800	19,101	18,112	682
<b>JENEPONTO</b>		<b>73.04</b>	<b>422,267</b>	<b>300,446</b>	<b>283,840</b>	<b>11,914</b>

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Jeneponto 2025

Berdasarkan perbandingan tabel aktivasi Identitas Kependudukan Digital tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Jeneponto menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun pada awalnya jumlah aktivasi IKD tergolong rendah, yakni hanya 1.983 penduduk pada tahun 2023, setelah sosialisasi dilaksanakan secara menyeluruh di tiap kelurahan/desa, jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 11.914 penduduk pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam mendorong keberhasilan implementasi IKD.

### 3.5. Konfirmasi

Setelah menggunakan IKD masyarakat akan melakukan penilaian ulang mengenai inovasi ini bermanfaat dan layak dipertahankan, jika masyarakat puas, masyarakat akan menguatkan komitmen untuk terus menggunakan IKD dan bahkan bisa merekomendasikan kepada orang lain, konfirmasi positif memperkuat adopsi jangka panjang. Dimensi konfirmasi dalam teori difusi inovasi Rogers menekankan pentingnya evaluasi dan pengalaman individu setelah mengadopsi inovasi. Proses ini tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tetapi juga dapat berdampak pada penyebaran inovasi dalam masyarakat. Setelah mengadopsi inovasi, masyarakat akan mengalami pengalaman langsung dengan inovasi tersebut. Masyarakat akan mencari umpan balik, baik dari mereka sendiri maupun dari orang lain, untuk menentukan inovasi tersebut dapat memberikan manfaat yang di butuhkan.

Konfirmasi dalam penelitian ini yaitu bagaimana respon masyarakat setelah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital, pengalaman positif atau negatif oleh masyarakat mengenai inovasi Identitas Kependudukan Digital dapat mempengaruhi keputusan untuk terus menggunakan atau menghentikan penggunaan inovasi tersebut. Jika masyarakat merasa bahwa inovasi Identitas Kependudukan Digital bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhannya maka masyarakat akan terus menggunakannya, begitupun sebaliknya jika masyarakat merasa tidak puas, masyarakat mungkin akan menghentikan penggunaan inovasi tersebut. Proses konfirmasi ini sangat penting dalam penyebaran inovasi. Jika banyak masyarakat yang merasa puas dengan inovasi tersebut, kemungkinan besar inovasi akan tersebar lebih luas. Sebaliknya jika banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan inovasi

Identitas Kependudukan Digital maka, hal ini dapat menghambat difusi inovasi.

Bapak Danny berpendapat bahwa aplikasi Identitas Kependudukan Digital memiliki manfaat yang besar untuk membantu dalam mempercepat pengurusan administrasi, walaupun bapak Danny merasa masih perlu adanya perbaikan dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital, selain pak Danny beberapa masyarakat juga setuju untuk terus menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dikarenakan merasa bahwa inovasi tersebut merupakan inovasi yang dapat membantu masyarakat kedepannya walaupun untuk di daerah kabupaten Jeneponto sendiri masih belum diterapkan secara langsung oleh dinas-dinas lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat yang telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merasakan manfaat nyata dari penggunaan aplikasi tersebut, terutama dalam mempercepat proses administrasi. Hal ini tercermin dari komitmen masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Danny Kuriawan, yang menyatakan akan terus menggunakan IKD meskipun masih diperlukan beberapa perbaikan. Respon positif dari masyarakat ini menjadi indikator bahwa inovasi IKD memiliki potensi untuk terus digunakan dan tersebar lebih luas apabila didukung oleh pengalaman pengguna yang memuaskan.

Di sisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung penyebaran inovasi melalui pengembangan sosialisasi secara berkelanjutan. Meskipun belum ada strategi khusus yang dirumuskan, namun langkah yang akan diambil seperti jemput bola dan pelibatan pemangku kebijakan di tiap jenjang menjadi langkah konkret untuk mendorong peningkatan jumlah aktivasi IKD.

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berbagai studi sebelumnya telah mengkaji pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di berbagai wilayah. Penelitian ini tidak hanya memperkuat literatur yang ada, tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Jeneponto memiliki kesesuaian dengan strategi-strategi yang terbukti efektif di berbagai daerah.

Restu Widyo Sasongko (2023) di Kabupaten Bandung menekankan pentingnya edukasi karena rendahnya literasi digital, tantangan yang juga ditemukan di Jeneponto. Namun, pendekatan terjun langsung di Jeneponto menjadi kekuatan yang belum banyak diterapkan secara konsisten di Bandung. Enis Tristina et al. (2023) di Karanganyar menunjukkan bahwa workshop dapat meningkatkan pemahaman warga, sementara di Jeneponto pendekatan dilakukan melalui kelembagaan resmi Disdukcapil. Nursyarif et al. (2024) di Samarinda menemukan bahwa sosialisasi disambut antusias meski edukasi tentang keamanan data masih diperlukan, yang juga terjadi di Jeneponto. Sugandini dan Novaria (2024) menekankan pentingnya literasi digital, sebagaimana dilakukan di Jeneponto melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan penggunaan media sosial. Dian Herdiana (2018) memberikan dasar teoritis yang penting dalam konteks ini. Ia menekankan bahwa sosialisasi merupakan proses strategis dalam kebijakan publik meskipun tidak masuk dalam siklus formal (formulasi–implementasi–evaluasi). Sosialisasi bertujuan membangun pemahaman masyarakat sebelum kebijakan dijalankan. Perspektif ini sangat relevan dalam konteks aktivasi IKD, di mana keberhasilan implementasi sangat bergantung pada bagaimana kebijakan dipahami oleh masyarakat. Zhao et al. (2023) menyimpulkan bahwa transparansi digital dan partisipasi publik berperan penting dalam adopsi layanan digital. Hal ini sejalan dengan pendekatan sosialisasi langsung dan terbuka yang dilakukan di Jeneponto. Faruq et al. (2024) menyoroti pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pelayanan publik digital. Strategi ini juga diterapkan di Jeneponto melalui pelibatan tokoh masyarakat dan aparat desa, meski belum mengintegrasikan teknologi tingkat lanjut seperti AI.

Dengan demikian, penelitian ini mendukung dan memperkuat temuan penelitian sebelumnya, bahwa keberhasilan aktivasi IKD sangat ditentukan oleh strategi sosialisasi yang adaptif, partisipatif, dan kontekstual. Pendekatan lapangan yang digunakan oleh Disdukcapil Kabupaten Jeneponto berbasis geografis dan kultural menjadi ciri khas tersendiri dibandingkan wilayah lain yang lebih maju dari segi infrastruktur dan akses teknologi.

### **3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan temuan yang sangat menarik terkait dengan upaya Disdukcapil Kabupaten Jeneponto dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. penulis menemukan bahwa salah satu yang menjadi hambatan utama peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten adalah implementasi Identitas Kependudukan Digital belum terlaksana dengan baik atau belum tepat sasaran. Belum adanya penerapan aplikasi IKD di instansi lain menjadi penghambat utama dalam percepatan difusi inovasi IKD, sehingga masyarakat belum melihat urgensi atau keuntungan praktis dari memiliki IKD. Dalam artikelnya, Henriyani (2015:4) menyatakan bahwa "tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan 'jembatan' antara dunia konsep dengan dunia realita." Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diinternalisasikan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pelaksana dan penerima manfaat. Selain itu penulis juga menemukan beberapa faktor penghambat lainnya yaitu; sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya masyarakat yang menghadiri sosialisasi, manfaat yang belum dirasakan secara langsung, perangkat yang kurang mendukung dan jaringan yang tidak stabil, serta kurangnya kepercayaan masyarakat.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital melalui sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung sejalan dengan tahapan dalam teori *Diffusion of Innovations* dari Rogers, mulai dari pengetahuan hingga konfirmasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berhasil meningkatkan jumlah pengguna IKD secara signifikan. Meskipun demikian, metode sosialisasi ini belum sepenuhnya optimal, mengingat masih adanya kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan untuk pemerataan dan peningkatan aktivasi IKD guna mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada waktu penelitian. Di karenakan rentan waktu penelitian kurang lebih 15 Hari kerja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan sosialisasi dan kolaborasi antar instansi lainnya agar peningkatan aktivasi IKD dapat terlaksana dengan baik.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan peneliti.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alhammadi, A. A., Alhashmi, S. M., Lataifeh, M., & Rice, J. L. (2024). The influence of national digital identities and national profiling systems on accelerating the processes of digital transformation: A mixed study report. *Computers*, 13(9), 243. <https://doi.org/10.3390/computers13090243>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. (2024). *Kabupaten Jeneponto dalam angka*. BPS Kabupaten Jeneponto. <https://jenepontokab.bps.go.id/publication/2024/02/28/f310fcb8f2f851818727580f/kabupaten-jeneponto-dalam-angka-2024.html>
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc
- Faruq, M., Wardiyanto, B., Umpain, S. H., & Toyib, M. (2024). Collaboration of Stakeholders and AI in The Implementation of New Public Service in The Digital Era. *Golden Ratio of Human Resource Management*, 5(1), 63–70. <https://doi.org/10.52970/grhrm.v5i1.656>
- Gatiningsih, G., & Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Henriyani, E. (2015). *Problematika dalam Implementasi Kebijakan Publik*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(4) <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/2852>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26. <https://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Hilowle, M., Yeoh, W., Grobler, M., Pye, G., & Franks, H. (2024). Improving national digital identity systems usage: Human-centric cybersecurity survey. *Journal of Computer Information Systems*, 64(6). <https://doi.org/10.1080/08874417.2023.2251452>
- Hutasoit, I. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bandung: ALFABETA.
- Hutasoit, I. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bandung: Alfabeta.
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Deepublish. Retrieved from <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/8055a38c-f6e9-4947-9888-bb9197201244>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nursyarif, M. K., Tirta, M. W., Wahyudi, T., Patimah, S., Muawwanah, S., & Arbansyah, A. (2024). *Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Samarinda Pada Revolusi Digital*. Pandawa: Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat, 2(1), 56-63. <https://journal.aripi.or.id/index.php/Pandawa/article/view/426>
- Rogers E.M. (1995). *Difusi Dari Inovasi (Edisi Ketiga)*. London The Free Press
- Sasongko, R. W. (2023). *Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung*. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69-86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Schmid, S., & Alt, R. (2023). Analysis of social acceptance for the use of digital identities. *Computers*, 12(3), 51. <https://doi.org/10.3390/computers12030051>
- Simangungsong F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung ALFABET, CV, h.230
- Spiliotopoulos, T., Sheik, A. T., Gottardello, D., & Dover, R. (2023). Onboarding citizens to digital identity systems. arXiv preprint. <https://arxiv.org/abs/2306.13511>
- Sugandini, A. S., & Novaria, R. (2024). Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Melalui Pengoptimalisasian Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 252-262. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1190/1257>

- Tristiana, E., Ardyati, R., & Yulianti, S. W. (2023). *Pelaksanaan Inovasi Identitas Kependudukan Digital sebagai Wujud Transformasi Digital Dokumen Kependudukan di Kabupaten Karanganyar*. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(11), 2291-2298. <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/6807>
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). *Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jeparo Kota Surabaya*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43-51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>
- Zhao, B., Cheng, S., Schiff, K. J., & Kim, Y. (2023). Digital transparency and citizen participation: Evidence from the online crowdsourcing platform of the City of Sacramento. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101868. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101868>

